

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA
(STUDI KASUS DESA AMPELSARI KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN)**

Maria Christina Kusumaningtyas¹, Fitriyah²
Email: mariachrsto301@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi perempuan merupakan kunci pembangunan inklusif, namun sering kali terhambat oleh budaya patriarki, terbatasnya akses keputusan, serta beban domestik. Menariknya, Desa Ampelsari di Kebumen menunjukkan dinamika berbeda dengan tingkat keterlibatan perempuan yang tinggi dalam Musrenbangdes. Hal ini didorong oleh kepemimpinan kepala desa perempuan yang membuka ruang partisipasi lebih luas. Fenomena tersebut menjadikan Desa Ampelsari lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses perencanaan pembangunan desa yang responsif gender berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbangdes serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu teori partisipasi politik dengan pendekatan tangga partisipasi Arnstein, teori gender yang menjelaskan pembagian peran sosial perempuan, serta teori perencanaan partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Desa Ampelsari tidak hanya terlihat dari kehadiran secara formal, tetapi juga dari keterlibatan dalam proses penyampaian aspirasi dan pengusulan program pembangunan. Tingkat kehadiran perempuan dalam forum Musrenbangdes mencapai lebih dari 38% dari total peserta. Sejumlah usulan yang berasal dari kelompok perempuan, seperti program kesehatan keluarga,

pemberdayaan ekonomi rumah tangga, serta penguatan organisasi perempuan, telah diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi perempuan dari sekadar kehadiran simbolik menuju partisipasi yang lebih substantif dalam proses perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ampelsari telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi, yaitu mendekati tingkat partnership. Meskipun demikian, partisipasi tersebut masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki, keterbatasan perempuan dalam posisi strategis di lembaga desa, serta beban peran domestik yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam forum publik.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Musrenbangdes, Perencanaan Pembangunan Desa, Kepemimpinan Perempuan.

ABSTRACT

Women's participation is key to inclusive development, but it is often hampered by patriarchal culture, limited access to decision-making, and domestic burdens. Interestingly, Ampelsari Village in Kebumen shows a different dynamic with a high level of women's involvement in the Musrenbangdes (Village Development Planning Forum). This is driven by the leadership of the female village head, who has opened up wider opportunities for participation. This phenomenon makes Ampelsari Village a highly relevant location for further study on how gender-responsive village development planning processes take place.

This study aims to analyse the level of women's participation in village development planning through the Musrenbangdes forum and to identify the factors that influence this involvement. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews and documentation. The research analysis uses several theoretical frameworks, namely political participation theory with Arnstein's ladder of participation approach, gender theory that explains the division of women's social roles, and participatory planning theory that emphasises the importance of community involvement in the development process.

The results show that women's participation in Musrenbangdes in Ampelsari Village is not only evident from their formal attendance but also from their involvement in the process of expressing their aspirations and proposing development programmes. The attendance rate of

women in the Musrenbangdes forum reached more than 38 per cent of the total participants. A number of proposals originating from women's groups, such as family health programmes, household economic empowerment, and the strengthening of women's organisations, have been accommodated in the Village Government Work Plan (RKPDes). This condition shows a shift in the form of women's participation from mere symbolic presence to more substantive participation in the development planning process.

Overall, this study concludes that women's participation in development planning in Ampelsari Village has reached a higher level of participation, namely approaching the level of partnership. However, this participation still faces obstacles such as patriarchal culture, women's limited access to strategic positions in village institutions, and the burden of domestic roles that affect their level of involvement in public forums.

Keywords: Women's Participation, Musrenbangdes, Village Development Planning, Women's Leadership.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan paradigma pembangunan menunjukkan adanya pergeseran dari model yang bersifat sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Pendekatan pembangunan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran

dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu forum yang menjadi sarana partisipasi masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta usulan program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah desa. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam forum

pembangunan desa masih menghadapi berbagai hambatan. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak daerah seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terbatas dalam ruang publik (Nufus, 2020; Putri, 2009).

Perempuan juga sering menghadapi beban peran ganda, yaitu menjalankan peran domestik dalam rumah tangga sekaligus peran sosial di masyarakat, yang menyebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam forum pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan diri serta minimnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa juga menjadi faktor yang membatasi ruang partisipasi mereka (Moser, 1993; Butler, 1990). Dalam konteks ini, Sherry Arnstein (1969) melalui konsep Tangga Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi (tokenisme) hingga kendali penuh warga (citizen control).

Meskipun demikian, terdapat beberapa desa yang menunjukkan dinamika berbeda. Salah satunya adalah Desa Ampelsari di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, yang menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan yang relatif tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Data menunjukkan bahwa perempuan hadir dalam forum

Musrenbangdes dalam jumlah yang signifikan, mencapai sekitar 38 persen dari total peserta. Fenomena ini semakin menarik karena Desa Ampelsari juga dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan yang mendorong penerapan prinsip pembangunan partisipatif, serta memiliki inovasi kelembagaan berupa forum Wanita Melek Perencanaan (Wani Lemper) yang secara khusus mewadahi aspirasi perempuan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa melalui studi kasus Musrenbang Desa Ampelsari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Situs penelitian dipilih

berdasarkan karakteristik uniknya, yaitu tingginya keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan desa serta adanya inovasi kelembagaan berbasis gender seperti Musdus Perempuan dan forum Wani Lemper.

Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling yang kemudian dikembangkan dengan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri atas: kepala desa, ketua BPD, ketua PKK, kepala dusun, perwakilan Wani Lemper, kader Posyandu, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), perwakilan dinas PMD kabupaten, serta perempuan yang aktif maupun tidak aktif dalam Musrenbang. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik kejenuhan data (data saturation).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatoris dan wawancara mendalam semi-terstruktur, yang didukung oleh studi dokumentasi terhadap dokumen desa seperti RPJMDes, RKPDes, daftar hadir Musrenbangdes, dan Peraturan Desa. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Musrenbang 2025 di Desa Ampelsari

Proses Musrenbangdes 2025 di Desa Ampelsari diawali dengan rangkaian kegiatan pra-Musrenbang yang berfungsi menghimpun aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Sebelum menghimpun aspirasi, pemerintah desa membentuk tim penyusun rencana pembangunan yang beranggotakan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, unsur perempuan, dan unsur masyarakat. Tahapan krusial adalah penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus) Perempuan yang dipanitiai oleh forum Wanita Melek Perencanaan (Wani Lemper). Musdus Perempuan dilaksanakan di seluruh RW pada 20–24 Maret 2025, dengan rata-rata lebih dari 40 orang peserta per RW, mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat.

Usulan yang muncul dari Musdus Perempuan didominasi tema pemberdayaan perempuan seperti pelatihan UMKM, pengadaan sarana dan prasarana Posyandu, dan pelatihan wanita produktif. Musrenbangdes 2025 kemudian dilaksanakan pada 10 September 2025 di balai desa. Dari total 39 peserta, 15 orang adalah perempuan atau sekitar 38,46%, melampaui target minimal 30% yang ditetapkan dalam regulasi kabupaten. Para

delegasi perempuan yang berasal dari Musdus berperan menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan Posyandu, serta pelatihan keterampilan ekonomi rumah tangga.

B. Partisipasi Perempuan dalam Proses Musrenbangdes

Partisipasi perempuan di Desa Ampelsari tidak berhenti pada pemenuhan angka kehadiran, tetapi telah bergerak menuju partisipasi yang lebih substantif. Jika dibaca melalui kerangka Tangga Partisipasi Arnstein, posisi perempuan Ampelsari telah naik dari sekadar tokenism menuju tingkat partnership, karena usulan mereka dibahas, dinegosiasikan, dan dialokasikan dalam RKPDes. Rekapitulasi hasil Musrenbangdes 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari Musdus Perempuan berhasil diakomodasi, di antaranya: Kelas Ibu Hamil, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan PSN, penguatan sarana Posyandu, pelatihan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk, pelatihan pembuatan pupuk cair, dan pelatihan pembuatan keripik.

Perbedaan substansi usulan antara perempuan dan laki-laki di Ampelsari selaras dengan konsep triple role Caroline Moser, yaitu perempuan menjalankan peran reproduktif, produktif, dan komunitas

secara bersamaan. Laki-laki cenderung mengusulkan program pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan saluran air, sedangkan perempuan lebih banyak mengusulkan program terkait kesehatan ibu dan anak, gizi, kelas ibu hamil, serta pelatihan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan membantu mendorong keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat desa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Perempuan

Faktor pendukung partisipasi perempuan di Desa Ampelsari dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterlibatan perempuan didorong oleh tingkat pendidikan yang memadai, motivasi pribadi untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, serta pengalaman berorganisasi dalam PKK, Posyandu, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan pendapat. Secara eksternal, partisipasi perempuan sangat didukung oleh kepemimpinan kepala desa perempuan (Umi Maskanah) yang bersifat inklusif dan pro-partisipasi, regulasi kabupaten yang menetapkan kuota minimal 30% keterlibatan perempuan, serta adanya

inovasi kelembagaan melalui Musdus Perempuan dan forum Wani Lemper.

Kepala Desa Umi Maskanah tidak hanya mendukung secara normatif, tetapi juga merancang inovasi kelembagaan yang secara aktif membuka ruang partisipasi perempuan. Seperti yang beliau ungkapkan: “Waktu sebelum ada Wani Lemper, peran perempuan hanya sebagai memenuhi kuota kuorum 30% dan hanya mewakili. Kalau keterwakilan sekarang setelah ada Wani Lemper, setelah ada Musdus emak-emak, memang betul-betul mewakili, membawa suara dari dusun para perempuan.” (Wawancara Kepala Desa, 10 September 2025). Program pendampingan seperti Sekolah Penggerak Perempuan (Segerpuan) juga turut meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami dan mengawal siklus perencanaan desa.

Di sisi lain, partisipasi perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan kultural berupa norma patriarki yang masih memandang urusan pemerintahan desa sebagai ranah laki-laki, hambatan struktural berupa dominasi laki-laki dalam BPD dan posisi kepala dusun, serta hambatan domestik dan ekonomi berupa beban peran ganda perempuan. Banyak perempuan sulit meninggalkan rumah atau tempat usaha untuk menghadiri Musrenbang. Mekanisme “titip usulan” melalui kader PKK atau Posyandu

membantu memastikan suara perempuan tetap tersalurkan, namun membuat pengalaman berpartisipasi langsung tidak dirasakan sepenuhnya oleh semua perempuan.

D. Posisi Partisipasi Perempuan Desa Ampelsari dalam Tangga Arnstein

Berdasarkan analisis temuan lapangan dengan kerangka Tangga Partisipasi Arnstein, partisipasi perempuan di Desa Ampelsari dapat diposisikan mendekati tingkat *partnership*. Secara deskriptif, perempuan telah hadir dalam jumlah yang signifikan di forum Musrenbangdes (38,46% peserta), mengisi sekitar 42–43% posisi perangkat desa, dan menempati satu kursi dari lima anggota BPD. Secara substantif, keterwakilan perempuan tampak dari masuknya sejumlah usulan ke dalam RKPDes, serta pengakuan dari kepala desa, kepala dusun, BPD, dan dinas kabupaten bahwa partisipasi perempuan memberikan kontribusi nyata pada orientasi program desa.

Posisi ini lebih maju dibanding temuan penelitian terdahulu seperti Nufus (2020) di Gampong Ulee Nyeu dan Putri (2009) di Laweyan yang melaporkan partisipasi perempuan masih terjebak di level *tokenism*. Namun, Desa Ampelsari belum sepenuhnya mencapai tingkatan *delegated power* atau *citizen control* karena

struktur kekuasaan formal seperti BPD dan kepala dusun masih didominasi laki-laki, dan partisipasi aktif belum tersebar merata di kalangan seluruh perempuan. Keberlanjutan inovasi partisipasi juga masih bergantung pada komitmen kepala desa yang sedang menjabat, sehingga pelembagaan mekanisme secara tertulis menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Ampelsari menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta dalam forum perencanaan pembangunan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari adanya ruang partisipasi seperti forum Wani Lemper dan Musdus Perempuan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan usulan program. Tingkat kehadiran perempuan mencapai 38,46%, melampaui target minimal 30%, dengan sejumlah usulan substantif berhasil diakomodasi dalam RKPDes.

Faktor pendukung utama partisipasi perempuan di Desa Ampelsari adalah kepemimpinan kepala desa perempuan yang inklusif, inovasi kelembagaan Musdus Perempuan dan Wani Lemper,

regulasi afirmatif kabupaten, serta keaktifan organisasi perempuan seperti PKK, Posyandu, dan KWT. Melalui Tangga Partisipasi Arnstein, partisipasi perempuan Ampelsari telah mencapai tingkat mendekati partnership, bergerak dari sekadar kehadiran simbolik menuju pengaruh substantif dalam perencanaan pembangunan desa.

Namun demikian, sejumlah hambatan masih perlu diatasi: budaya patriarki yang masih menempatkan urusan publik sebagai ranah laki-laki, dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan lokal seperti BPD dan kepala dusun, serta beban peran ganda perempuan dalam ranah domestik. Tantangan ke depan terletak pada penghapusan hambatan kultural-domestik dan penguatan posisi struktural perempuan, serta pelembagaan mekanisme partisipasi afirmatif melalui peraturan desa yang mengikat agar keberlanjutan capaian tidak bergantung pada komitmen kepala desa yang sedang menjabat.

SARAN

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah: (1) Pemerintah Desa Ampelsari diharapkan mempertahankan serta memperkuat forum partisipatif perempuan seperti Wani Lemper dan Musdus Perempuan, serta melembagakannya melalui peraturan desa yang mengikat

untuk menjamin keberlanjutannya; (2) Kelompok atau organisasi perempuan diharapkan memperkuat koordinasi antaranggota dan mendorong keterlibatan perempuan muda agar keberlanjutan partisipasi perempuan di desa terjaga; (3) Perlu dilakukan intervensi untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Budiardjo, M. (2007). *Pengantar Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Ekawati, S. (2010). *Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Studi deskriptif kualitatif di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sebelas Maret.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kepala Desa Ampelsari. (2025). *Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Ampelsari Tahun 2025–2026*. Pemerintah Desa Ampelsari.
- meningkatkan representasi perempuan dalam posisi struktural seperti BPD dan kepala dusun, guna memastikan aspirasi perempuan terwakili tidak hanya dalam forum musyawarah tetapi juga dalam pengambilan keputusan formal desa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* (2nd ed.). Rand McNally College Publishing Company.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge.
- Nufus, H. (2020). *Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi kasus Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara tahun 2018–2019)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Desa Ampelsari. (2024). *Profil Desa Ampelsari*. Website Resmi Desa Ampelsari. <https://ampelsari.kec-petanian.kebumenkab.go.id/>
- Putri, A. P. (2009). *Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif: Studi deskriptif kualitatif di Kelurahan Laweyan, Kota Surakarta* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sebelas Maret.

Rizki, N. A. (2016). Musrenbang perempuan sebagai arena perjuangan kesetaraan perempuan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro